



NOMOR 55 TAHUN 2015 SERI 12.50

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 55 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dalam lingkup industri dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada;
9. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun;
10. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2019.
- (2) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainnya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (3) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah :

- a. Menentukan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
- b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.
- c. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 – 2019 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi uraian tentang indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019.

BAB V

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2015

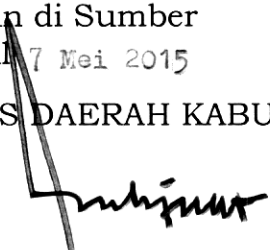
BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 55 , SERI B.50



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2014 - 2019



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIREBON**

Jl. Sunan Kalijaga No. 10 Sumber - Cirebon Telp./Faks. (0231) 321495 - 321073



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 10 Telp. (0231) 321495-321073

S U M B E R

45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 800 / Kpts.02 / Sek. / 2014

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 - 2019

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 yang efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.,4);
11. Peraturan Bupati Cirebon No.60 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan

ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum PERTAMA adalah merumuskan dan menyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : 20 Pebruari 2014

**KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. H A K I, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580725 198603 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nomor : 800 / Kpts. 02 / Sek. / 2014

Tanggal : 20 Februari 2014

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2014 – 2019**

- Pengarah** : 1. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
- Ketua** : Kepala Sub Bagian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
- Sekretaris** : Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
- Anggota** : 1. Kepala Seksi Industri Hasil Hutan Disperindag Kab. Cirebon
2. Kepala Seksi Industri Agro Dan Kimia Disperindag Kab. Cirebon
3. Kepala Seksi ILMEA Disperindag Kab. Cirebon
4. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kab. Cirebon
5. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri Disperindag Kab. Cirebon
6. Kepala Seksi Promosi Hasil Industri Dan Perdagangan Disperindag Kab. Cirebon
7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Disperindag Kab. Cirebon
8. Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar Disperindag Kab. Cirebon
9. Kepala Seksi Bimbingan, Konsultasi Dan Mediasi Disperindag Kab. Cirebon
10. Kepala Seksi Pengawasan Standarisasi Dan Mutu Produk Disperindag Kab. Cirebon
11. Kepala Sub Bagian Umum Disperindag Kab. Cirebon
12. Kepala Sub Bagian Keuangan Disperindag Kab. Cirebon

Di Tetapkan di : Sumber

Pada Tanggal : 20 Februari 2014

**KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. HAKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580725 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, hidayat dan petunjuk bagi kami, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 yang disusun sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program bagi pembangunan perindustrian dan perdagangan selama periode 2014-2019 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perindustrian dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada bidang perindustrian dan perdagangan.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor kunci keberhasilan, strategi kebijakan, tujuan, sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon pada akhir tahun anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan.

Sumber, ~~30~~ April 2015

^ Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan b
Kabupaten Cirebon



H. ERRY ACHMAD HUSAERI
NIP. 19620128 198608 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah salah satu dinas daerah di Kabupaten Cirebon yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon harus dapat mensukseskan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon.

Adapun visi Kabupaten Cirebon adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi dan sejahtera. Sedangkan misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah misi ke-5, yaitu : mewujudkan standard hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun yang terdiri atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Adapun Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon tahun 2014 – 2019 adalah :

“Terwujudnya industri dan perdagangan yang unggul di tingkat nasional”

Definisi operasional :

Unggul adalah suatu kondisi dimana produk yang sama tetapi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Jawa Barat dilihat dari segi mutu, harga, tempat yang strategis dan jaringan distribusi yang bersaing dengan cara efisiensi, peningkatan kualitas SDM dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Sedangkan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah :

1. Meningkatkan daya saing industri;
2. Meningkatkan daya saing perdagangan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, terwujud di dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan industri;
2. Meningkatnya perlindungan konsumen;
3. Meningkatnya pertumbuhan Perdagangan;
4. Meningkatnya penyelenggaraan pasar dan PKL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAN IKHTISAR EKSEKUTIF.....i

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABELvii

DAFTAR GAMBAR.....viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis
Tahun 2014-2019..... 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 10

2.2. Sumber Daya SKPD..... 19

2.2.1. Sumber Daya yang dimiliki SKPD 19

2.2.2. Asset/Sarana dan Prasarana 22

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD..... 24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Kebijakan 26

3.1.1 Kebijakan Pembangunan Nasional 26

3.1.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 27

3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon 29

3.2 Permasalahan..... 29

3.2.1 Masalah Perindustrian 29

3.1.2 Masalah Perdagangan 30

3.3 Isu-isu Strategis 30

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1.	Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014	35
4.2.	Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014	35
4.3.	Nilai-Nilai Organisasi	36
4.4.	Tujuan	36
4.5.	Sasaran	37
4.6.	Strategi	44
4.7.	Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	45
4.8.	Kebijakan	46
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1.	Rencana Program dan Kegiatan	52
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	64
BAB VII	PENUTUP	71
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2014.....	19
Tabel 2.2.	Komposisi Golongan Ruang Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014.....	20
Tabel 2.3.	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tingkat Esselonering Tahun 2014.....	21
Tabel 2.4.	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014.....	22
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.....	24
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.....	25
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	39
Tabel 4.2.	Industri Kecil, Menengah dan Besar Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2014.....	48
Tabel 4.3.	Komoditi Unggulan Kabupaten Cirebon Tahun 2014	49
Tabel 4.4.	Realisasi Ekspor Komoditi Non Migas Kabupaten Cirebon Tahun 2014.....	50
Tabel 5.1.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	59
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	2
Gambar 1.2.	Pola Hubungan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
Gambar 1.3.	Sistem PPN, AKIP dan Penganggaran.....	3
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.....	11

Gambar 2.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007.....	8
Gambar 2.2.	Perkembangan Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Pekerja di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007 (dalam ribuan).....	10
Gambar 2.3.	Grafik Kesempatan Kerja Di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007.....	11
Gambar 2.4.	Grafik Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2007.....	11
Gambar 2.5.	Data Perkembangan Unit Usaha Tahun 2006-2007 di Kabupaten Cirebon.....	13
Gambar 2.6.	Data Perkembangan Unit Usaha Tahun 2007-2008 di Kabupaten Cirebon.....	13
Gambar 2.7.	Data Perkembangan Nilai Produksi Tahun 2006-2007 di Kabupaten Cirebon.....	14
Gambar 2.8.	Data Perkembangan Nilai Produksi Tahun 2007-2008 di Kabupaten Cirebon.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

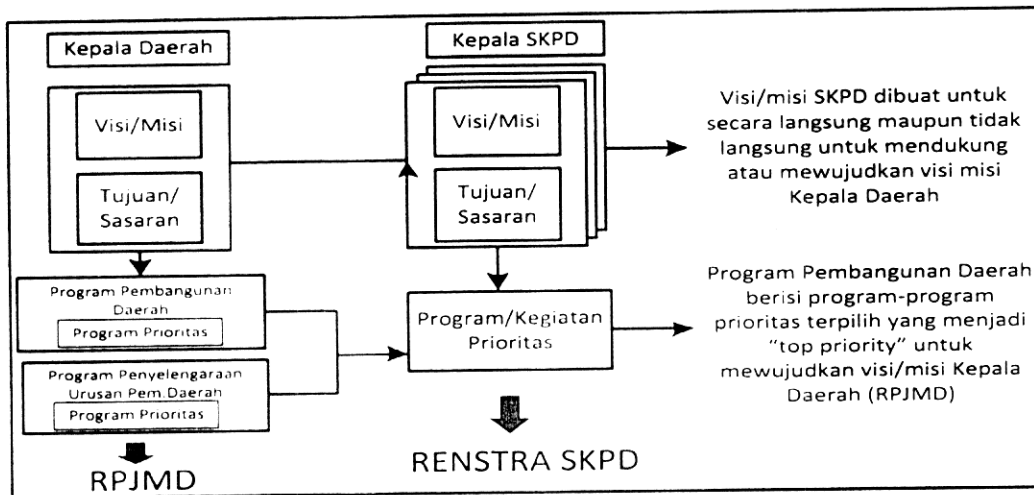
Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis. Rencana strategis merupakan suatu alat manajemen yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana masa depan. Rencana strategi dapat dilihat sebagai formulasi secara komprehensif (menyeluruh) yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan/kegagalan (indikator kinerja) dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategi (renstra) SKPD adalah cara SKPD untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan menentukan arah SKPD dan antisipasinya terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, baik internal maupun eksternal dan untuk mempertahankan eksistensinya di masa depan.

Adapun fungsi renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mendukung atau mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih baik secara langsung maupun tidak langsung serta untuk mendukung program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.1
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

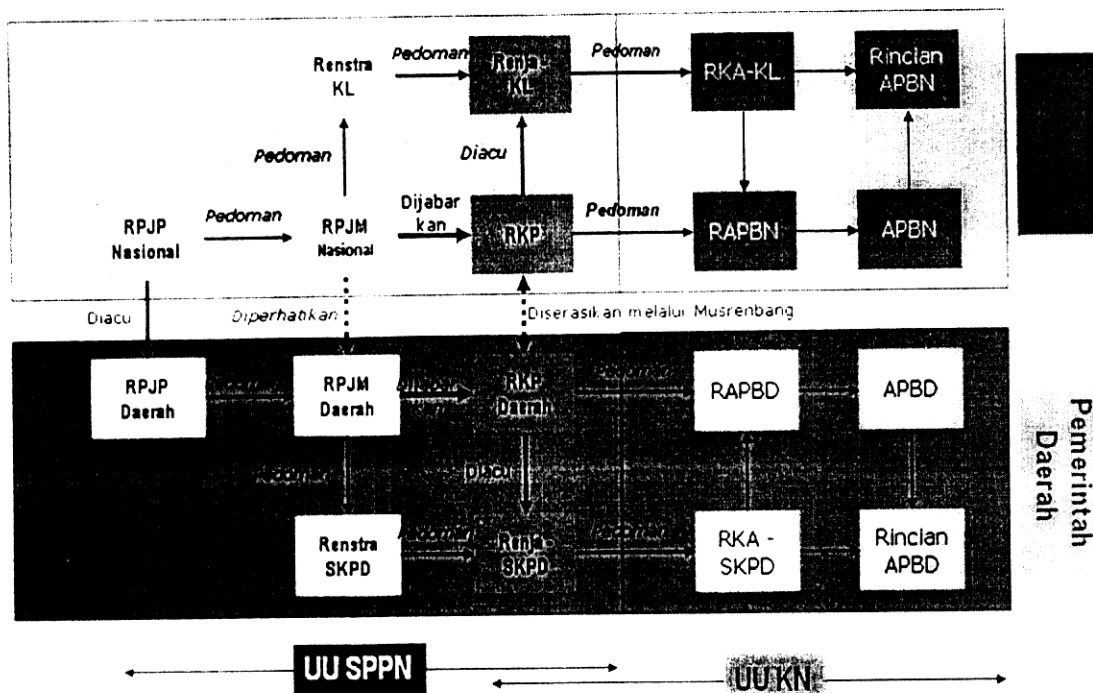


Penyusunan rencana strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rancangan Renstra-SKPD disusun berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Sebagaimana dikemukakan dalam Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah bahwa dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan. Untuk itu dilaksanakan tahapan penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut :

- Pertama, Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah. Kegiatan ini dibutuhkan guna mendapatkan gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
- Kedua, Penyiapan rancangan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (rancangan Renstra-SKPD) yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunan rancangan Renstra-SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.
- Ketiga, Penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra-SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJM Daerah.

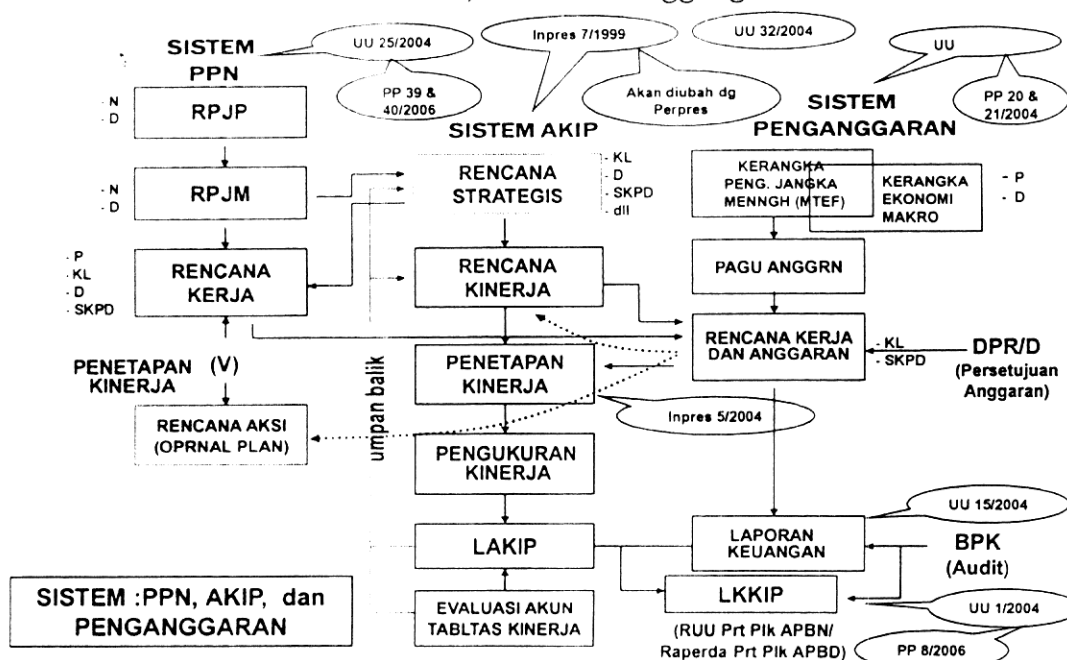
Berikut ini dapat dikemukakan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja SKPD.

Gambar 1.2
Pola Hubungan Dokumen Renstra dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



Sementara itu pola hubungan antara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan sistem penganggaran dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.3
Sistem PPN, AKIP dan Penganggaran





1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Disperindag Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Seri D.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 Seri E.4);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2008 Seri D.18).



1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2014-2019

1.3.1 Maksud

Penyusunan rancangan rencana strategis ini dimaksudkan untuk menyusun program dan kegiatan kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga diharapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang kinerjanya senantiasa lebih baik.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rancangan rencana strategis ini yaitu :

1. Untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana capaian target dan realisasi kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada awal tahun penyusunan Renstra.
2. Sebagai bahan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam menyusun rencana kerja yang memuat program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.
- 1.2 Landasan Hukum : memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.



- 1.4 Sistematika Penulisan : menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini memuat tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra, bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari



- sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD.
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menerangkan tentang program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, tahun 2014-2019.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2019.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dalam lingkup industri dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dalam lingkup industri dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perekonomian dalam lingkup industri dan perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri, perdagangan dan promosi, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terdiri atas :

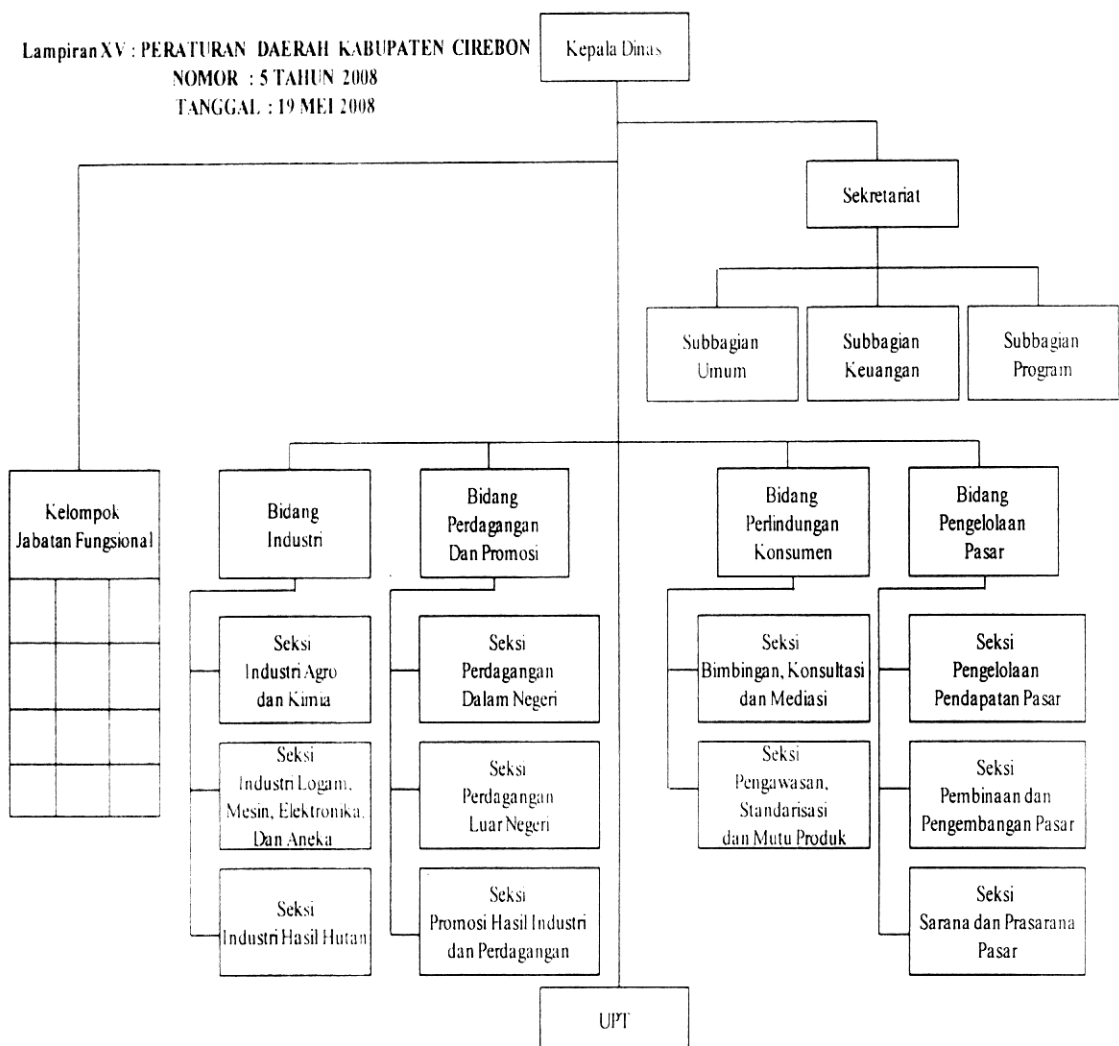
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Program.
- c. Bidang Industri, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Agro dan Kimia;
 - 2) Seksi Industri Logam. Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - 3) Seksi Industri Hasil Hutan.
- d. Bidang Perdagangan dan Promosi, membawahi :
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;



- 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- 3) Seksi Promosi Hasil Industri dan Perdagangan.
- e. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi :
 - 1) Seksi Bimbingan, Konsultasi dan Mediasi;
 - 2) Seksi Pengawasan, Standardisasi dan Mutu Produk.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan





↓ **Uraian Tugas dan Fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon**

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, dan program dinas. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. Pengelolaan penyusunan program Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai 3 Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program.

☞ **Kepala Sub Bagian Umum**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. Pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Kepala Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dinas. Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dan



- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Kepala Sub Bagian Program**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas. Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program Subbagian Program dan Dinas;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. Pelaksanaan tugas penyusunan program Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang Industri. Bidang Industri mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri kimia dan agro, logam, mesin, perekayasaan, elektronika, aneka, dan industri hasil hutan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Industri mempunyai 3 Seksi yaitu Seksi Industri Kimia & Agro; Seksi Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika & Aneka dan Seksi Industri Hasil Hutan.

☞ **Seksi Industri Kimia & Agro**

Mempunyai tugas melaksanakan industri kimia dan agro. Fungsi dari Seksi Industri Kimia & Agro yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri kimia dan agro;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri kimia dan agro;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri kimia dan agro;
dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri,
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Seksi Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika & Aneka**
Mempunyai tugas melaksanakan industri logam, mesin, perekayasaan, elektronika dan aneka. Fungsi dari Seksi Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika & Aneka mempunyai tugas melaksanakan industri logam, mesin, perekayasaan, elektronika dan aneka yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri logam, mesin, perekayasaan, elektronika dan aneka;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri logam, mesin, perekayasaan, elektronika dan aneka;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri logam, mesin, perekayasaan, elektronika dan aneka; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Seksi Industri Hasil Hutan**

Mempunyai tugas melaksanakan industri hasil hutan. Fungsi dari Seksi Industri Hasil Hutan yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri hasil hutan;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri hasil hutan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri hasil hutan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perdagangan dan Promosi

Bidang Perdagangan dan Promosi mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan. Bidang Perdagangan dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan promosi;

- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan promosi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta promosi hasil industri dan perdagangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan dan Promosi mempunyai 3 Seksi yaitu Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Seksi Perdagangan Luar Negeri, Seksi Promosi Hasil Industri dan Perdagangan.

☞ **Seksi Perdagangan Dalam Negeri**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan dalam negeri. Fungsi dari Seksi Perdagangan Dalam Negeri yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dalam negeri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Seksi Perdagangan Luar Negeri**

Mempunyai tugas melaksanakan perdagangan luar negeri. Fungsi dari Seksi Perdagangan Luar Negeri yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan luar negeri;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan luar negeri; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya, yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Seksi Promosi Hasil Industri dan Perdagangan**



Mempunyai tugas melaksanakan promosi hasil industri dan perdagangan. Fungsi dari Seksi Promosi Hasil Industri dan Perdagangan yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi hasil industri dan perdagangan;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi hasil industri dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang promosi hasil industri dan perdagangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Konsumen

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan konsumen. Fungsi dari Bidang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan konsumen;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan standarisasi mutu produk, bimbingan, konsultasi, dan mediasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai 2 Seksi yaitu Seksi Pengawasan, Standarisasi & Mutu Produk dan Seksi Bimbingan, Konsultasi & Mediasi.

☞ Seksi Pengawasan, Standarisasi & Mutu Produk

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, standarisasi dan mutu produk. Fungsi dari Seksi Pengawasan, Standarisasi & Mutu Produk adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, standarisasi dan mutu produk;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan, standarisasi dan mutu produk;



☞ **Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar**

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan pasar. Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan pasar;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan pasar;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pendapatan pasar; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pasar. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pasar;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan pengembangan pasar;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan pasar; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

☞ **Seksi Sarana dan Prasarana Pasar**

Mempunyai tugas melaksanakan sarana dan prasarana pasar. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pasar;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana pasar;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sarana dan prasarana pasar; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya yang dimiliki SKPD

Sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dari segi kuantitas sudah cukup memadai yakni berjumlah 99 orang pegawai namun dilihat dari latar belakang pendidikannya masih belum cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing. Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana baru mencapai 36,6% dari keseluruhan pegawai. Berikut komposisi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2014

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		PNS	Tenaga Kerja Kontrak
1	Pasca Sarjana (S-2)	12	-
2	Sarjana (S-1)	24	6
3	D4	-	-
4	D-3	3	1
5	D-1	-	-
6	SLTA	51	13
7	SMP	4	1
8	SD	5	4
	JUMLAH	99	25

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Cirebon Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut dapat dilihat bahwa dari aspek kuantitas jumlah pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilihat dari beban kerja yang ada sudah cukup memadai, namun dari aspek kualitas belum cukup memadai karena dilihat dari rata-rata jumlah keseluruhan



pegawai yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana baru mencapai 36,6% dari keseluruhan pegawai.

Sedangkan untuk mengetahui daftar urut kepangkatan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Golongan Ruang Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon Tahun 2014

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV/c	Pembina Utama muda	1
2	IV/b	Pembina Tk. I	3
3	IV/a	Pembina	2
4	III/d	Penata Tk I	14
5	III/c	Penata	6
6	III/b	Penata Muda Tk I	12
7	III/a	Penata Muda	6
8	II/d	Pengatur Tk I	3
9	II/c	Pengatur	2
10	II/b	Pengatur Muda Tk I	36
11	II/a	Pengatur Muda	7
12	I/d	Juru Tk I	2
14	I/b	Juru Muda Tk I	5
Jumlah			99

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Cirebon Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa Daftar Urut Kepangkatan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, golongan IV/c dengan pangkat Pembina Utama Muda berjumlah 1 orang yakni Kepala Dinas, Gol IV/b berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 2 orang Kepala Bidang, untuk Gol IV/a berjumlah 2 orang terdiri dari 1 Kepala Bidang dan 1 Fungsional (Arsiparis), Gol III/d berjumlah 14 orang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian Hukum KPU, 1 orang Kepala Sub Bagian pada Sekretariat dan 11 orang

Kepala Seksi, serta Gol III/c berjumlah 6 orang terdiri dari 2 Kasubag, dan 1 Fungsional, dan 3 orang staff, sementara Gol III/b berjumlah 12 orang, selebihnya adalah pelaksana yang tersebar dari Gol I/b sampai dengan Gol III/a.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Cirebon Berdasarkan Tingkat Esselonering Tahun 2014

NO	ESSELONERING	JUMLAH
		(ORANG)
1	II/b	1
2	III/a	1
3	III/b	4
3	IV/a	15
4	Non	78
Jumlah		99

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Cirebon Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.3 di atas jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berdasarkan tingkat esselon untuk II/b berjumlah 1 orang, esselon III/a berjumlah 1 orang, esselon III/b berjumlah 4 orang dan esselon IV/a sebanyak 15 orang, sedangkan yang non esselon berjumlah 78 orang.

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dilihat berdasarkan komposisi jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)	
		PNS	Tenaga Kerja Kontrak
1	Laki-Laki	82	21
2	Perempuan	17	4
Jumlah		103	25

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Cirebon Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2.4 di atas jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan jenis kelamin untuk PNS laki-laki sebanyak 82 orang dan perempuan sebanyak 17 orang, sedangkan untuk Tenaga Kerja Kontrak laki-laki sebanyak 21 orang dan perempuan sebanyak 4 orang.

2.2.2 Asset / Sarana dan Prasarana

a. Sarana

Sarana pendukung, meliputi :

a. Kendaraan bermotor, terdiri dari :

- Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit,
- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit

b. Komputer PC sebanyak 14 (empat belas) unit, Personal Komputer/Note Book sebanyak 5 (lima) unit , Printer sebanyak 14 (empat belas) unit, Infokus sebanyak 1 (satu) unit, Layar Infokus sebanyak 1 (satu) unit, Scanner sebanyak 1 (satu) unit, Stabilizer 1 (satu) unit, Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 7 (tujuh) unit, Hard Disk Eksternal 1 (satu) unit.

c. Peralatan jaringan sebanyak sebanyak 3 (tiga) jaringan

d. Alat bejana ukur sebanyak 1 (satu) unit, Alat timbangan Mettler Toledo sebanyak 1 (satu) unit,

e. Penyejuk ruangan (AC) sebanyak 16 (enam belas) unit



- f. Mesin tik manual sebanyak 1 (satu) unit, Mesin tik elektrik sebanyak 1 (satu) unit
- g. Meja sebanyak 66 (enam puluh enam) unit, lemari besi kaca sebanyak 9 (sembilan) unit, filling cabinet sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, kursi putar sebanyak 84 (delapan puluh empat) unit.
- h. Dispenser sebanyak 4 (empat) unit, Kompor gas sebanyak 1 (satu) unit, Tabung Gas sebanyak 1 (satu) unit, Lemari Es sebanyak 1 (satu) unit.
- i. Alat komunikasi Radio VHF Unit Transceiver Portable dan stationary sebanyak 2 (dua) unit, Handy Talky sebanyak 13 (tiga belas) unit, Antena VHM/FM sebanyak 8 (delapan) unit.

b. Prasarana

Sedangkan Prasarana pendukung yang ada berupa 1 (satu) unit gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga No. 10 Sumber Telp. (0231) 321073 dan 321495, serta 8 (delapan) unit bangunan pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu Pasar Ciledug, Pasar Babakan, Pasar Cipeujeuh, Pasar Sumber, Pasar Kueh Weru, Pasar Pasalaran, Pasar Jamblang, Pasar Palimanan serta Pasar Batik Weru.



2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
2																			
3																			
4																			
5		N		I			H							L					
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	N			I			H						L				

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Kebijakan

3.1.1 Kebijakan Pembangunan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional meliputi :

1. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019** untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:
 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



2. Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia

MDGs bukan hanya merupakan pemenuhan komitmen internasional tetapi merupakan penajaman upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, MDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan Nasional.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak. Adapun kedelapan tujuan pembangunan millenium terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

3.1.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2013-2018 diarahkan untuk :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Jawa Barat;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi public dimaknai melalui



- kebijakan penyelenggaraan *good governance* yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mewujudkan JawaBarat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energy baru terbarukan;
 5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

Sementara itu arah kebijakan dan strategi pembangunan Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama 2013–2018 adalah sesuai dengan **Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan**, memuat di dalamnya **Bidang Perindustrian** melalui **strategi**, meningkatkan daya saing industri, dengan arah kebijakan (a) peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki). Serta **Bidang Perdagangan** melalui **strategi**, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan (a) peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri; (b) peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; (c) Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional.



3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon

kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan, yaitu (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik- sarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Cirebon masuk kedalam program ke-2 yaitu bidang ekonomi. Kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi terdiri dari :

1. Membangun ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal wilayah;
2. Meningkatkan investasi daerah dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah;
3. Membangun dan memantapkan kemajuan usaha mikro dan koperasi dengan penguatan tata kelola kelembagaan dan kemampuan daya saing.

3.2 PERMASALAHAN

3.2.1 Masalah Perindustrian

1. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi masih sederhana, sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk;
2. Sulit mencari SDM yang terampil dan kompeten, seperti dalam bidang desain dan tenaga ahli;
3. Wawasan tentang pemasaran terbatas, sehingga umumnya sulit mengadakan terobosan pasar;
4. Lemah dalam kepemilikan modal;
5. Masih kurang optimalnya dukungan R & D;
6. Lemahnya kemampuan dan proteksi (perlindungan) terhadap desain, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
7. Manajemen yang diterapkan umumnya sangat sederhana (Manajemen Keluarga) dan belum menerapkan konsep bisnis yang jelas;
8. Kesadaran untuk pengelolaan lingkungan sangat rendah;



9. Beberapa komoditi sering mengalami kekurangan bahan baku, mengingat sebagian besar industri di Kab. Cirebon bahan bakunya sangat tergantung dari luar daerah;
10. Belum memadainya Infrastruktur Industri.

3.2.2 Masalah Perdagangan

1. Iklim usaha yang kurang sehat;
2. Kurang optimalnya sistem logistic;
3. Kurang tersedianya fasilitas perdagangan yang memadai;
4. Kondisi pasar tradisional yang belum tertata dengan baik;
5. Terbatasnya pangsa pasar (*market share*) luar negeri;
6. Kurangnya kualitas sarana dan prasana pasar tradisional serta pedagang kaki lima/asongan;
7. Maraknya penyebaran produk-produk yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, peralatan lainnya (UTTP), belum berstandar SNI wajib serta meningkatnya produk dengan penggunaan bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat;
8. Lemahnya penetrasi pasar.

3.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan dan analisis berbagai permasalahan di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon menetapkan isu strategis sebagai berikut :

3.3.1 Iklim usaha belum kondusif

Beberapa aspek yang saat ini dirasakan masih belum mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif adalah :

1. Selisih/*spread* antara tingkat bunga kredit dan simpanan masih besar, sehingga rangsangan investasi kepada sektor riil relatif kurang disisi lain tingkat bunga pinjaman masih relatif tinggi sehingga belum dapat mendukung pengembangan sektor riil;
2. Biaya pengelolaan persediaan dan distribusi masih relatif tinggi yang berpengaruh terhadap harga jual produk;
3. Kenaikan BBM dan TDL, yang mengakibatkan meningkatnya faktor biaya produksi;



4. Penerapan otonomi daerah masih belum sempurna terutama yang menyangkut koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri dan perdagangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.3.2 Keterkaitan usaha/kemitraan strategis yang saling menguntungkan antar pelaku indag masih rendah

Salah satu aspek dalam pengembangan klaster industri adalah terbangunnya keterkaitan usaha yang saling menguntungkan dan dirasakan secara sadar oleh para pelakunya. Bentuk keterkaitan pada masing-masing level baik *backward linkage/downstream chain* maupun *forward linkage/upstream chain* yang mampu menciptakan efesiensi dalam setiap rantai nilai baik vertikal maupun horizontal masih kurang (industri hulu dan hilir / industri utama dengan industri pendukung). Demikian pula antara pedagang kecil dengan pedagang besar dan keterkaitan usaha antara IKM dan Industri Besar dalam struktur industri masih relatif belum memadai.

3.3.3 Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan industri masih rendah

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih rendah. Dalam mewujudkan pertumbuhan industri andalan/unggulan daerah, diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk setiap industri andalan/unggulan yang dikembangkan sehingga Kabupaten Cirebon mampu membangun industri yang utuh dan mandiri. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut digunakan untuk riset dan pengembangan produk yang terintegrasi serta merupakan suatu siklus yang terstruktur.

3.3.4 Kurangnya tenaga ahli desain produk

Konsumen produk industri saat ini tidak hanya melihat dari faktor kualitas produk semata, tetapi lebih melihat dari faktor inovasi dan desain-desain produk yang dibuat. Kabupaten Cirebon khususnya untuk industri meubel dan rotan sangat kekurangan tenaga ahli dalam bidang desain produk. Kondisi ini membuat sektor industri meubel dan rotan kalah bersaing dengan negara-negara lain penghasil industri yang sama.



3.3.5 Penguasaan pasar dalam negeri masih rendah

Potensi pasar dalam negeri Indonesia termasuk Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon pada khususnya relatif masih besar untuk dapat menyerap berbagai hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti kelompok makanan, kelompok sandang, dan sebagainya. Sebagian besar diharapkan dapat dipasok oleh para pelaku usaha industri dan perdagangan yang beroperasi di Kabupaten Cirebon. Tetapi faktanya penguasaan pasar dalam negeri di nilai belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor disamping aspek budaya, kecintaan terhadap produk lokal, dan daya saing produk lokal terhadap produk impor serta pengetahuan/informasi yang diperoleh masyarakat masih belum mampu membentuk struktur persaingan pasar yang sempurna.

3.3.6 Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang beredar belum optimal

Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen yang timbul di Kabupaten Cirebon sudah dibentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), namun belum maksimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana BPSK serta belum tersosialisasikannya keberadaan BPSK di Kabupaten Cirebon.

Peredaran barang di wilayah Kabupaten Cirebon masih banyak yang belum memenuhi standar mutu produk sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan terbatasnya petugas pengawas barang beredar, disamping rendahnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya.

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa barang dan jasa. Adapun bentuk perlindungan konsumen dilakukan antara lain tera / tera ulang terhadap alat ukur (UTTP) yang digunakan oleh pedagang. Untuk melakukan tera/tera ulang oleh Disperindag Kab. Cirebon harus dibentuk UPT Kemetrolagian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 tahun 2009. Namun sampai saat ini UPT Kemetrolagian Kabupaten Cirebon belum terbentuk. Oleh karena itu dalam melakukan Uji / tera alat

ukur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan balai metrologi Provinsi Jawa Barat yang mempunyai wewenang untuk menguji/mentera alat ukur sehingga alat ukur yang digunakan oleh pedagang/pengusaha sesuai dengan standar dan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 1981).

3.3.7 Perkembangan globalisasi, ekonomi liberalisasi dan pasar bebas

Globalisasi merupakan proses dimana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarnegara dan antarmanusia menjadi semakin tidak terbatas. Arus globalisasi dan ekonomi liberalisasi dan pasar bebas akan berpengaruh kepada perkembangan industri dan perdagangan. Terlebih sejak ACFTA (Asean China Free Trade Assosiation) diberlakukan, barang-barang dari China mulai membanjiri pasar Indonesia. Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk-produk buatan Indonesia. Terlebih Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi ACFTA dan MEA yaitu Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor. Menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastuktur, dan sektor industri.

3.3.8 Kestabilan suplai bahan pokok dan strategis, fluktuasi harga dan tingkat inflasi

Indikasi kenaikan harga yang fluktuatif pada periode tertentu disamping faktor musim juga mengindikasikan sistem distribusi yang kurang lancar. Pengendalian komoditas bahan pangan dan beberapa komoditi strategis lainnya sangat penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat banyak serta berdampak kepada tingkat inflasi.



3.3.9 Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima/Asongan masih belum optimal

Pasar tradisional merupakan salah satu sarana perdagangan yang berkaitan dengan pedagang kecil serta merupakan sarana bagi pemasaran produk hasil pertanian. Meskipun pasar di Kabupaten Cirebon (pasar pemda dan pasar desa) relatif banyak namun keberadaannya harus berbenah seiring dengan tumbuh berkembangnya toko modern yang memperjualbelikan barang yang sama. Sedangkan keberadaan pedagang kaki lima/asongan yang jumlahnya selalu bertambah dan tidak mempunyai tempat seperti yang dimiliki pasar tradisional maupun toko modern sehingga perlu adanya penataan baik tempat maupun fisik bangunannya serta pemberdayaan kepada para pedagang.

3.3.10 Kompetensi SDM pelaku usaha industri dan perdagangan belum memadai

Jumlah entrepreneurship dan tenaga kerja yang memiliki *knowledge/skill* masih relatif terbatas dan penyebarannya belum merata. Peningkatan jumlah wirausaha baru di sektor perdagangan yang merata di setiap tempat diharapkan dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Arah dan apa yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi pada prinsipnya dapat terlihat dari visi dan misi unit yang akan dilaksanakan. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistis berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh unit organisasi. Di samping itu visi menggambarkan pandangan jauh ke depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi yang diinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota unit kerja/organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan.

Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-aspek, yaitu: mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit kerja/organisasi; memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam unit kerja/organisasi; memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan unit kerja/organisasi; serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit kerja/organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menentukan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan panjang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon menetapkan visi tahun 2014-2019 yaitu sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG UNGGUL DI
TINGKAT NASIONAL”**

4.2. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit kerja untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan kerja unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi



ini, diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat berpartisipasi dalam mendorong keberhasilannya. Dalam merumuskan misi, unit kerja/organisasi telah memperhatikan masukan dari para pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing industri;
2. Meningkatkan daya saing perdagangan.

4.3. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai luhur dari perilaku organisasi ini merupakan tolak ukur dari keberhasilan organisasi di dalam mencapai visi dan misinya. Nilai-nilai yang dianut terdiri dari **profesionalitas, kreativitas, produktivitas, inovasi, dan integritas** merupakan ukuran yang mengandung kebenaran dan kebaikan mengenai keyakinan dan perilaku organisasi seluruh bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nilai-nilai yang dianut tersebut digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan misi serta upaya pencapaian visi.

4.4. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitas organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi. Tujuan dimaksudkan untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya dengan pernyataan tujuan, organisasi telah semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dilihat dari sudut pandang manajemen strategik, alasan utama keberadaan suatu organisasi adalah untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan organisasi tersebut dalam kondisi lingkungan selalu berubah dengan sangat cepat. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, organisasi



dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Kemampuan berkompetisi akan tumbuh dalam tubuh organisasi apabila terdapat rumusan tentang tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan visi, misi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan industri;
2. Meningkatnya perlindungan konsumen;
3. Meningkatnya pertumbuhan Perdagangan;
4. Meningkatnya penyelenggaraan pasar dan PKL

4.5 Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategik organisasi. Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, semesteran, atau triwulanan. Agar sasaran ini dapat efektif maka dibuat menjadi spesifik, dapat dinilai, dapat diukur dan berlaku pada masa sekarang.

Sasaran organisasi harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Agar sasaran ini dapat dioperasionalkan, maka hendaknya memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut :

1. Dapat diukur.

Semua sasaran agar disusun dengan tolak ukur yang realistis dan memenuhi kriteria simplifikasi. Untuk dapat diukur, maka sasaran disusun secara kuantitatif dengan angka-angka ordinal yang jelas.

2. Adanya skala prioritas yang tajam dan jelas.

Penentuan skala prioritas pada intinya mendahulukan hal-hal yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan skala prioritas maka organisasi mengetahui apa yang mendesak dan kegiatan apa saja yang masih dapat ditunda pelaksanaannya.



Sasaran-sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sesuai tabel berikut dibawah ini :

TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DICAPAI					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN		2014	2015	2016	2017	2018			2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Meningkat nya pembinaan dan pertumbuhan industri	1. Meningkat nya pertumbuhan industri	Jumlah Peningkatan kualitas produk industri	Per tahun	IKM	25	25	50	60	65	85	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	6,461,781,369	
			Per tahun	IKM	7	7	10	10	10	10	1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	4,164,021,000	
			Produk	-	-	20	20	20	20	2. Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur	697,760,369		
		Jumlah penggunaan teknologi tepat guna										3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	1,600,000,000
			Per tahun	IKM	40	40	50	50	50	50	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi	4,619,500,000	
			Per tahun	IKM	-	-	25	25	25	25	1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	2,219,500,000	
		2. Meningkat nya kemampuan SDM industri dan kerja sama antar pemangku kepentingan	Jumlah SDM industri yang terlatih	Per tahun	IKM	-	-	10	10	10	10	2. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	2,400,000,000
				Per tahun	SDM	-	-	10	10	10	10	Program pembinaan industri	800,000,000
				Per tahun	SDM	20	20	23	23	23	23	1. Pengembangan industri hasil tembakau melalui penerapan good manufacturing practice (GMP)	400,000,000
	Per tahun			SDM	-	-	5	8	8	8	2. Pengembangan pemasaran industri hasil tembakau	400,000,000	
	Per tahun			SDM	10	10	30	30	30	30	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	7,162,285,975	
	Per tahun			Komoditi	-	-	3	3	3	3	1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	3,332,145,000	
		Jumlah akurasi database perusahaan	Per tahun									2. Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri	925,000,000
												3. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	1,064,980,175
												4. Pemetaan dan pengembangan database perusahaan	600,000,000

TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DICAPAI					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN		2014	2015	2016	2017	2018			2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Jumlah fasilitasi kerja sama antar Pelaku Usaha	Per tahun	MOU	3	3	10	10	10	10	5. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	620,080,400	
			Per tahun	MOU	3	3	10	10	10	10	6. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta	620,080,400	
	3. Berfungsi nya cluster industri potensial	Jumlah cluster industri potensial	Per tahun	Komoditi	-	-	2	2	2	2	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	12,000,000,000	
											1. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	10,000,000,000	
			Per tahun	Komoditi	-	-	3	3	3	3	2. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	2,000,000,000	
											Program Penataan Struktur Industri	5,606,598,300	
			Pertahun	Komoditi	-	-	2	2	2	2	1. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	3,500,000,000	
											2. Pembinaan keterkaitan industri hulu hingga hilir	2,106,598,300	
			Pertahun	MOU	3	3	5	5	5	5			
2. Meningkatkan perlindungan konsumen	1. Meningkatkan pemahaman, keamanan dan	Jumlah masyarakat/konsumen yang mengetahui hak dan kewajiban konsumen	Per tahun	orang	240	240	240	240	240	240	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	6,484,326,200	
			Jumlah Permasalahan yang terfasilitasi	Per tahun	Penyelesaian Aduan	-	-	48	24	24	24	1. Sosialisasi Perlindungan Konsumen	1,418,096,000
												2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	250,000,000
												3. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	598,392,050
	Jumlah jenis produk dan jasa yang aman dikonsumsi sesuai dengan standard	Per tahun	Jenis	500	500	500	500	500	500				

TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DIC					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN		2014	2015	2016	2017	2018			2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya sesuai standar	Per tahun	tertib ukur	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrologi an	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrologia n	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrologi an	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrologi an	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrologi an	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrologi an	4. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	4,217,838,150	
3. Meningkat nya pertumbuhan Perdagangan	1. Meningkat nya fasilitas pelayanan ekspor dan promosi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	Per tahun	Pengusaha	50	50	100	100	100	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	8,543,653,800	
		peningkatan jumlah nilai ekspor	Per tahun	%	1	1	3	3	3	3	1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	629,604,800	
		jumlah database potensi unggulan yang akurat	Per tahun	Dokumen	-	-	1	-	1	-	2. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri	7,414,049,000	
	2. Meningkat nya informasi pemantauan barang kepokmas dan strategis serta perlindungan pasar tradisional	Tersedianya data harga barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dan Barang penting/Strategis, tersedianya data ketersediaan stok barang kepokmas berbasis web	Per tahun	Komoditi & Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4,759,880,500	
		Jumlah lokasi sosialisasi produk dalam negeri yg strategis	Per tahun	Lokasi	-	-	7	7	7	7	1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	2,509,880,500	
		Jumlah pendirian toko modern yang berjarak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Cirebon	Per tahun	%	-	-	5	5	5	10	3. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	2,000,000,000	
												4. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	250,000,000

TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DIC					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN								
						2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Meningkatnya penyelenggaraan pasar	1. Meningkatkan penataan pasar tradisional pemda										Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	77,745,339,999
		Tersedianya sarana dan prasarana pasar dan fasilitas umum yang memadai	Per tahun	Pasar	9 Pemeliharaan pasar	9 Pemeliharaan pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	1. Penataan Sarana dan Prasarana Pasar	71,963,958,550
		Jumlah SDM pasar tradisional yang terbina	Per tahun	orang	320	320	320	320	320	320	2. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar	3,980,131,196
		Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar tradisional pemda	Per tahun	%	4	4	4	4	4	4	3. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1,801,250,253



4.6 Strategi

4.6.1 Analisis Kondisi Internal dan Eksternal

4.6.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terdiri dari :

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah memadai.
2. Tingkat pendidikan formal pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memadai.
3. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
4. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan.
5. Kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mengembangkan kemampuan dan karirnya.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kurangnya keterampilan dan wawasan pegawai tentang pembinaan perusahaan.
2. Anggaran yang disediakan kurang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
4. Kurangnya promosi produk-produk unggulan.
5. Lemahnya koordinasi antara daerah, provinsi, dan pusat
6. Kurangnya aktualisasi data-data potensi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Cirebon.
7. Masih banyak program kegiatan dinas yang belum menyentuh komoditi-komoditi industri potensial di Kabupaten Cirebon.

4.6.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Banyaknya komoditi unggulan daerah
2. Pangsa pasar masih luas
3. Tersedianya tenaga kerja industri dan perdagangan
4. Banyaknya perusahaan industri dan perdagangan di Kabupaten Cirebon

5. Kepres No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan produk dalam negeri
6. Tersedia bahan baku dari Sumber Daya Alam lokal
7. Tersedianya akses jalan tol.
8. Wilayah Kabupaten Cirebon yang strategis.

b. Ancaman (Threats)

1. Rendahnya standarisasi mutu produk
2. Kurang tersedianya bahan baku komoditi unggulan
3. Banyaknya barang impor ilegal yang beredar
4. Kepmen Perdagangan No. 36 tahun 2009 tentang ekspor bahan baku rotan.
5. Lemahnya permodalan perusahaan
6. Krisis global yang melanda dunia
7. Tumbuh pesatnya pasar modern (minimarket dan supermarket).
8. Akses kredit yang relatif masih sulit dan suku bunga pinjaman masih relative tinggi.

4.7 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Succes Factors*) adalah faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dengan diketahuinya *Critical Succes Factors*, maka diharapkan dapat memudahkan organisasi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk dapat merealisasikan misi yang telah ditetapkan, organisasi harus berinteraksi dengan lingkungannya. Tanpa antisipasi yang baik terhadap lingkungannya, organisasi akan banyak menghadapi tantangan dalam pencapaian visi dan misinya. Pemahaman lingkungan baik eksternal maupun internal membawa organisasi untuk memposisikan diri pada tempat yang tepat serta mempersiapkan strategi yang paling sesuai dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan ditetapkannya skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh organisasi, maka diperoleh informasi yang

komprehensif apa yang harus diimplementasikan dan dianggap penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

Mengingat pentingnya untuk mengetahui *Critical Succes Factors* ini, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berusaha untuk merumuskan dengan menggali dari dalam organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini merupakan hal yang unik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang membawa organisasi ini untuk mencapai sukses di masa mendatang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon meliputi :

1. Konsistensi komitmen yang telah ditetapkan bersama.
2. Berfungsinya setiap elemen kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan baik dari tingkat pimpinan sampai pelaksana.
3. Terjalannya komunikasi yang baik antar bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
5. Ketersediaan tenaga teknis yang sesuai dengan kualifikasinya.
6. Penempatan pegawai pada posisi yang tepat (*the right man in the right place*).
7. Adanya regenerasi dan pendelegasian tugas yang berkelanjutan.
8. Tersedianya anggaran yang memadai.

4.8 Kebijakan

Berdasarkan hasil perumusan dari strategi yang dilakukan, maka strategi yang dipilih adalah strategi S-O (Strength-Opportunities). Strategi ini menekankan kepada pendekatan memaksimalkan kekuatan dan mengoptimalkan peluang yang ada. mengacu dari kekuatan dan peluang yang ada maka dapat diambil suatu kebijakan yang menjadi landasan arah prioritas kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, yaitu :

1. Memperkuat daya saing industri;
2. Penguatan pasar dalam negeri;
3. Stabilisasi harga dan penguatan pasar dalam negeri;
4. Memperkuat dan meningkatkan peran perdagangan dalam negeri;

5. Pengenalan produk, penguatan jaringan distribusi dan perluasan pasar dalam negeri dan luar negeri;
6. Menyebarluaskan informasi sentra-sentra produk komoditi unggulan khususnya produk siap ekspor dan penetrasi pasar;
7. Memperkuat dan Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri;
8. Mengidentifikasi penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, serta mengidentifikasi informasi perlindungan konsumen;
9. Mengintensifkan pengawasan daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur;
10. Mengintensifkan pengawasan peredaran barang dan jasa;
11. Penataan pasar tradisional dan penyediaan lokasi pedagang kaki lima dan asongan;
12. Penataan dan pemberdayaan pedagang pasar tradisional dan pedagang kaki lima dan asongan;
13. Penataan retribusi pelayanan pasar tradisional.

Kebijakan-kebijakan inilah yang akan bahan acuan program-program kerja atau kegiatan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2014 sampai dengan 2019.

Data untuk Industri Kecil, menengah dan besar, komoditi unggulan dan Realisasi Export Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :



Tabel 4.2.
Industri Kecil, Menengah dan Besar Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2014

NO.	URAIAN	JUMLAH			
		2013		2014	
1	UNIT USAHA				
	- Industri Kecil dan Menengah	13.212	Unit Usaha	13.559	Unit Usaha
	- Industri Besar	126	Unit Usaha	130	Unit Usaha
	Subtotal	13.338	Unit Usaha	13.689	Unit Usaha
2	TENAGA KERJA				
	- Industri Kecil dan Menengah	103.058	Orang	104.793	Orang
	- Industri Besar	45.712	Orang	46.801	Orang
	Subtotal	148.770	Orang	151.594	Orang
3	NILAI INVESTASI (Rp. 000)				
	- Industri Kecil dan Menengah	Rp 352.287.195,75		Rp. 390.179.206,52	
	- Industri Besar	Rp 2.555.772.076,44		Rp. 2.683.560.680,26	
	Subtotal	Rp 2.908.059.272,19		Rp. 3.073.739.886,78	
4	NILAI PRODUKSI (Rp. 000)				
	- Industri Kecil dan Menengah	Rp 2.007.408.445,92		Rp. 2.092.422.193,60	
	- Industri Besar	Rp 4.340.805.164,50		Rp. 4.399.406.034,22	
	Subtotal	Rp 6.348.213.610,42		Rp. 6.348.213.610,42	
5	EKSPOR (US \$)	Rp 116.941.857,92		Rp 133.557.028,08	



Tabel 4.3.
Komoditi Unggulan Kabupaten Cirebon Tahun 2014

NO	JENIS KOMODITI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI (Rp.000,-)	KAPASITAS PRODUKSI	NILAI PRODUKSI (Rp. 000,-)
1	Meubel / Kerajinan Rotan	1.331	57.102	215.110.199	75.085 Ton	1.900.121.107
2	Meubel Kayu	1.245	7.351	51.311.013	1051.158 Pcs	362.117.011
3	Emping Melinjo	132	1.194	632.965	957 Ton	19.175.643
4	Roti & Makanan Ringan	417	5.029	7.586.165	13.202 Ton	146.142.050
5	Batu Alam	344	2.010	11.209.311	5.119.081 M ²	173.622.917
6	Sandal Karet	20	225	1.182.156	35.250 Kodi	4.355.100
7	Batik	530	4.408	12.519.682	21.152 Kodi	80.622.800
8	Konveksi	595	5.985	15.201.100	5.319.000 Pcs	20.051.600
9	Kerajinan Kulit Kerang	8	753	1.301.230	321.100 Pcs	12.544.094



Tabel 4.4.
Realisasi Ekspor Komoditi Non Migas Kabupaten Cirebon

NO	JENIS KOMODITI	VOLUME 2014			TUJUAN EKSPOR
		CONT	KGS	(\$)	
1	Udang Beku	6	64.884,15	365.951,17	Malaysia, China, Jepang
2	Rajungan	7	180.000,00	2.572.829,00	USA
3	Udang Broded Beku	42	244.780,98	1.505.808,70	Netherlands, USA, Jepang, Korea, Mesir
4	Kodok Beku	6	61.964,00	169.889,40	Belgia, Perancis
5	Ikan Teri				Jepang, Malaysia, Singapura
6	Layur Beku	11	289.746,50	505.830,73	China, Australia, Vietnam
7	Smanggi Beku				China
8	Cumi-cumi	1	26.437,00	31.724,40	China, Hongkong
9	Cumi Beku	55	1.757.141,70	2.125.228,22	China, Australia, Vietnam
10	Remang Beku				China
11	Sepia				China
12	Ikan Kurusi Beku				China
13	Kepiting Beku				China
14	Ikan Beku	7	159.127,64	290.835,93	Oman
15	Scallop				Perancis
16	Sontong Beku				China
17	Red Mullet				Belgia
18	Gindara Beku				China, Vietnam
19	Gurita	1	4.241,90	14.846,00	korea selatan
20	Minyak Jahe				-
21	Mebel Rotan	10.242	35.278.535,00	115.181.420,39	Asia, Amerika, Eropa, Australia
22	Kayu Olahan	251	423.340,10	502.644,72	Eropa, Amerika, Australia
23	Sumpit Kayu				Belgium, Netherland South Africa



NO	JENIS KOMODITI	VOLUME 2014			TUJUAN EKSPOR
		CONT	KGS	(\$)	
24	Bekicot				Jepang
25	Ubur - ubur				Korea, Jepang, Singapura
26	Kerajinan Kulit Kerang	19	4.813,00	30.768,00	Italia, Perancis, Hongaria,, Polandia
27	Benang Tenun	1.278	2.690.385,95	8.951.565,07	Eropa, Amerika, Asia
28	Tekstil	-	-	-	Eropa, Amerika, Asia
29	Dyer Canvas	37	164.779,25	507.151,35	Jepang, Thailand
30	Plastics Meshu - Sheet				Jepang, Thailand
31	Batik	-	-	-	-
32	Batu Alam	123	166.681	102.385,98	Eropa, Malaysia, Brunei
33	Buah		192.696	656.654,52	United Arab Emirat, Hongkong
34	Bawang Merah				Belgium
35	Rumput Laut	32	38.591	28.894,50	China
36	Ginger	1	26.000	12.600,00	UAE
	JUMLAH	12.119,00	41.774.144,67	133.557.028,08	



BAB V

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu memperkuat daya saing industri lokal, pengenalan produk, penguatan jaringan dan perluasan pasar, penataan pasar, dan mengintensifkan pengawasan dan pengendalian standard produk maka dapat disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Kegiatan yang akan dilakukan selama periode tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1 TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN													UNIT KERJA SKPD PENANG- GUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan industri	1. Meningkatnya pertumbuhan industri	Jumlah Peningkatan kualitas produk industri	2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				511.781.369		1.350.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		1.650.000.000		6.481.781.369			
			2.07.17.01	1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Input	Rupiah	414.021.000		414.021.000		800.000.000		900.000.000		950.000.000		1.100.000.000		4.164.021.000		
					Output	Pembinaan Teknik Produksi, Mengajar, Penerapan GKM dan lomba Desain IKM Rotan, kayu, dan bambu	150 IKM	150 IKM		300 IKM		400 IKM		450 IKM		500 IKM		1.800 IKM			
					Outcome	Jumlah peningkatan kualitas produk industri	25 IKM	25 IKM		50 IKM		60 IKM		65 IKM		85 IKM		285 IKM			
			2.07.17.03	2. Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur	Input	Rupiah	97.760.369		97.760.369		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		697.760.369		
					Output	Pembinaan kualitas produksi industri	15 IKM	15 IKM		30 IKM		30 IKM		30 IKM		30 IKM		135 IKM			
					Outcome	Jumlah peningkatan kualitas produk industri	7 IKM	7 IKM		10 IKM		10 IKM		10 IKM		10 IKM		47 IKM			
			2.07.17.04	3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Input	Rupiah	-		-		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.600.000.000		
					Output	Pembinaan HACCP, GMP makanan	-		-		100 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		400 IKM		
		Outcome			Jumlah peningkatan kualitas produk industri	-		-		20 Produk		20 Produk		20 Produk		20 Produk		80 Produk			
		Jumlah penggunaan teknologi tepat guna	2.07.15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi				369.500.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000		4.619.500.000			
			2.07.15.05	1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Input	Rupiah	369.500.000		369.500.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		500.000.000		2.219.500.000		
					Output	Pembinaan Teknis produksi IKM batik, IKM logam, Mengajar dan workshop industri kreatif, Fasilitas HKI untuk motif batik komunal Kab Cirebon dan konveksi	220 IKM	220 IKM		250 IKM		250 IKM		250 IKM		250 IKM		1.220 IKM			
					Outcome	Jumlah penggunaan teknologi tepat guna	40 IKM	40 IKM		50 IKM		50 IKM		50 IKM		50 IKM		240 IKM			
			2.07.15.06	2. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Input	Rupiah	-		-		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.400.000.000		
Output	Fasilitas HKI, Bantuan sarana dan prasarana IKM, Bantuan Peralatan, Pembinaan Teknis, Fasilitas Penerapan Batik Mark, Pembinaan Manajemen Pemasaran IKM LMEIA, Pembinaan				-		-		100 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		400 IKM				
Outcome	jumlah penggunaan teknologi tepat guna	-				-		25 IKM		25 IKM		25 IKM		25 IKM		100 IKM					

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN PAD AWAL PEREN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANG- GUNG JAWAB	LOKASI	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
		Jumlah akurasi database perusahaan		4. Pemetaan dan pengembangan database perusahaan	Input : Rupiah	-			150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		600.000.000		
					Output : Updating Data Base Industri, Pemetaan dan Profil komoditi Industri	-	-		3 Komoditi		3 Komoditi		3 Komoditi		3 Komoditi		3 Komoditi		12 Komoditi		
					Outcome : Jumlah database perusahaan komoditi yang akurat	-	-		3 Komoditi		3 Komoditi		3 Komoditi		3 Komoditi		3 Komoditi		12 Komoditi		
		Jumlah fasilitas kerja sama antar Pelaku Usaha	2.07.18.05	5. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	Input : Rupiah	20.080.400	20.080.400		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		620.080.400		
					Output : Fasilitas Antara Pihak Perbankan dengan Industri Kecil dan Menengah	30 IKM	30 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		430 IKM		
					Outcome : jumlah fasilitas kerja sama antar Pelaku Usaha	3 MOU	3 MOU		10 MOU		10 MOU		10 MOU		10 MOU		10 MOU		45 MOU		
			2.07.18.06	6. Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta	Input : Rupiah	20.080.400	20.080.400		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		620.080.400		
					Output : Fasilitas kerjasama antara industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta	30 IKM	30 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		430 IKM		
					Outcome : jumlah fasilitas kerja sama antar Pelaku Usaha	3 MOU	3 MOU		10 MOU		10 MOU		10 MOU		10 MOU		10 MOU		45 MOU		
3. Berfungsinya cluster industri potensial	Jumlah cluster industri potensial	2.07.19		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		12.000.000.000		
		2.07.19.01	1. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	Input : Rupiah				2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		10.000.000.000			
				Output : Penyediaan akses transportasi di sentra industri potensial				4 Komoditi		4 Komoditi		4 Komoditi		4 Komoditi		16 Komoditi					
				Outcome : jumlah cluster industri potensial				2 Komoditi		2 Komoditi		2 Komoditi		2 Komoditi		8 Komoditi					
		2.07.19.01	2. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Input : Rupiah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.000.000.000			
				Output : Penyediaan data informasi				4 Komoditi		4 Komoditi		4 Komoditi		4 Komoditi		16 Komoditi					
				Outcome : jumlah informasi cluster industri potensial				3 Komoditi		3 Komoditi		3 Komoditi		3 Komoditi		12 Komoditi					
		2.07.18		Program Penataan Struktur Industri			106.598.300		1.375.000.000		1.375.000.000		1.375.000.000		1.375.000.000		5.806.598.300				
		2.07.18.02	1. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Input : Rupiah				875.000.000		875.000.000		875.000.000		875.000.000		875.000.000		3.500.000.000			
				Output : Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	-	-		4 Komoditi		4 Komoditi		4 Komoditi		4 Komoditi		16 Komoditi					
				Outcome : jumlah sarana dan prasarana cluster industri potensial	-	-		2 Komoditi		2 Komoditi		2 Komoditi		2 Komoditi		8 Komoditi					
		2.07.18.03	2. Pembinaan keterampilan produksi industri hulu hingga hilir	Input : Rupiah	106.598.300	106.598.300		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.106.598.300			
Output : Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Produksi dan Kerja sama Afil Teknologi	15 IKM			15 IKM		20 IKM		20 IKM		20 IKM		20 IKM		95 IKM							
Outcome : jumlah kerja sama cluster industri potensial	3 MOU			3 MOU		5 MOU		5 MOU		5 MOU		5 MOU		18 MOU							

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN PADA AWAL PERENI	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANG GUNJAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3. Meningkatnya pertumbuhan Perdagangan	1. Meningkatnya fasilitas pelayanan ekspor dan promosi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	2.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				766.653.800		1.979.000.000		1.779.000.000		1.979.000.000		2.040.000.000		8.543.653.800		
			2.06.17.03		1. Sosialisasi kegiatan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Input : Rupiah		49.604.800		120.000.000		120.000.000		120.000.000		220.000.000		629.604.800		
						Output : Pembinaan prosedur ekspor dan impor bagi para pengusaha kecil dan menengah, Survey IKM		50 Pengusaha	50 Pengusaha	100 Pengusaha		100 Pengusaha		100 Pengusaha		100 Pengusaha		450 Pengusaha		
						Outcome : Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor		50 Pengusaha	50 Pengusaha	100 Pengusaha		100 Pengusaha		100 Pengusaha		100 Pengusaha		450 Pengusaha		
		peningkatan jumlah nilai ekspor	2.06.17.02		2. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri	Input : Rupiah		717.045.000		1.609.000.000		1.659.000.000		1.609.000.000		1.820.000.000		7.414.045.000		
						Output : Pameran perindustrian dan perdagangan		5 Pameran	5 Pameran	10 Pameran		10 Pameran		10 Pameran		10 Pameran		45 Pameran		
						Outcome : peningkatan jumlah nilai ekspor		1 %	1 %	3 %		3 %		3 %		3 %		13 %		
		jumlah database potensi unggulan yang akurat	2.06.17.05	3. Pengembangan data base informasi potensi unggulan		Input : Rupiah				250.000.000				250.000.000				500.000.000		
						Output : Pemutakhiran data base informasi potensi unggulan industri dan perdagangan				1 Dokumen				1 Dokumen				2 Dokumen		
						Outcome : jumlah database potensi unggulan yang akurat				1 Dokumen				1 Dokumen				2 Dokumen		
	2. Meningkatnya informasi pemantauan barang kepokmas dan strategis serta perlindungan pasar tradisional	Tersedianya data harga barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dan Barang penting/Strategis, tersedianya data ketersediaan stok barang kepokmas berbasis web	2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				309.880.500		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		4.759.880.500		
			2.06.18.03		1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Input : Rupiah		309.880.500		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.509.880.500		
						Output : Terpantau perkembangan harga barang kepokmas dan barang penting/strategis serta ketersediaan stok barang kepokmas berbasis web		26 Komo di 10 Kepokmas	26 Komo di 10 Kepokmas	26 Komo di 10 Komodi		26 Komodi 10 Komodi		26 Komodi 10 Komodi		26 Komodi 10 Komodi		26 Komodi 10 Komodi		
						Outcome : Tersedianya data harga barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dan Barang penting/Strategis, tersedianya data ketersediaan stok barang kepokmas berbasis web		26 Komo di 10 Kepokmas	26 Komo di 10 Kepokmas	26 Komo di 10 Komodi		26 Komodi 10 Komodi		26 Komodi 10 Komodi		26 Komodi 10 Komodi		26 Komodi 10 Komodi		
		Jumlah lokasi sosialisasi produk dalam negeri yg strategis	2.06.18.07		2. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Input : Rupiah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.000.000.000		
						Output : Tersosialisasikannya peningkatan penggunaan produk dalam negeri				7 Lokasi		7 Lokasi		7 Lokasi		7 Lokasi		28 Lokasi		
						Outcome : Jumlah lokasi sosialisasi produk dalam negeri yg strategis				7 buah		7 Lokasi		7 Lokasi		7 Lokasi		28 Lokasi		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN PAD AWAL PEREN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14
4. Meningkatnya penyelenggaraan pasar	1. Meningkatnya penataan pasar tradisional pemda	Jumlah pendirian toko modern yang berjarak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Cirebon	2.06.18.07	3. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Input	Rupiah				50.000.000			50.000.000		50.000.000		100.000.000		250.000.000			
					Output	Tersosialisasinya peraturan daerah Kabupaten Cirebon				5 %		5 %		5 %		10 %		25 %				
					Outcome	Jumlah pendirian toko modern yang berjarak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Cirebon				5 %		5 %		5 %		10 %		25 %				
					2.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			1.964.299.116		19.145.258.527		17.175.135.027		17.210.740.600		22.249.906.730		77.745.339.999			
		Tersedianya sarana dan prasarana pasar dan fasilitas umum yang memadai	2.06.19.07	1. Penataan Sarana dan Prasarana Pasar	Input	Rupiah	1.207.238.550	1.207.238.550		17.939.180.000		15.939.180.000		15.939.180.000		20.939.180.000		71.963.958.550				
					Output	Pembangunan/pemeliharaan pasar, pengurusan drainase, pengisian tabung pemadam kebakaran, serta pembangunan / Revitalisasi Pasar Tradisional	9 pemeliharaan Pasar	9 pemeliharaan Pasar	9 Pemeliharaan pasar	2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar	2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar	2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar	8 Revitalisasi pasar						
					Outcome	Tersedianya sarana dan prasarana pasar dan fasilitas umum yang memadai	9 pemeliharaan Pasar	9 pemeliharaan Pasar	9 Pemeliharaan pasar	2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar	2 Revitalisasi pasar	2 Pasar		9 Pemeliharaan pasar	8 Revitalisasi pasar						
		Jumlah SDM pasar tradisional yang terlatih	2.06.19.08	2. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar	Input	Rupiah	460.533.996	460.533.996		879.899.300		879.899.300		879.899.300		879.899.300		3.980.131.196				
					Output	Pembinaan manajemen pengelolaan pasar, sosialisasi penyelenggaraan pasar, sosialisasi pembinaan pasar desa, Pembinaan petugas keamanan, Pembinaan petugas pemungut retribusi, operasi terpadu keamanan dan ketertiban pasar, Survey IKM	320 orang	320 orang		320 orang		320 orang		320 orang		320 orang		1.600 orang				
					Outcome	Jumlah SDM pasar tradisional yang terlatih	320 orang	320 orang		320 orang		320 orang		320 orang		320 orang		1.600 orang				
		Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar tradisional pemda	2.06.19.09	3. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Input	Rupiah	296.526.570	296.526.570		326.179.227		356.055.727		391.661.300		430.827.430		1.801.250.253				
					Output	Pemungutan retribusi di pasar Pemda disekitar pasar pemda	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		60 Bulan				
Outcome	Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar tradisional pemda				4 %	4 %		4 %		4 %		4 %		4 %		20 %						

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAP/ ETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Jumlah akurasi database perusahaan	4. Pemetaan dan pengembangan database perusahaan	- Komoditi	- Komoditi	3 Komoditi	3 Komoditi	3 Komoditi	3 Komoditi	12 Komoditi
5.	Jumlah fasilitasi kerja sama antar Pelaku Usaha	5. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	3 IKM	3 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	43 MOU
		6. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta	3 IKM	3 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	43 MOU
		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial							
6.	Jumlah cluster industri potensial	1. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	- Komoditi	- Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi	8 Komoditi
		2. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	- Komoditi	- Komoditi	3 Komoditi	3 Komoditi	3 Komoditi	3 Komoditi	12 Komoditi
		Program Penataan Struktur Industri							
		1. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	- Komoditi	- Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi	8 Komoditi
		2. Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir	3 MOU	3 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	5 MOU	23 MOU
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							
7.	Jumlah masyarakat/konsumen yang mengetahui hak dan kewajiban konsumen	1. Sosialisasi Perlindungan Konsumen	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	240 orang	1,200 orang
8	Jumlah Permasalahan yang terfasilitasi	2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	-	-	48 Penyelesaian Aduan	24 Penyelesaian Aduan	24 Penyelesaian Aduan	24 Penyelesaian Aduan	120 Penyelesaian Aduan

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Jumlah jenis produk dan jasa yang aman dikonsumsi sesuai dengan standard	3. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	500 Jenis	500 Jenis	500 Jenis	500 Jenis	500 Jenis	500 Jenis	2.500 Jenis
10	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya sesuai standar	4. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolgian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolgian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolgian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolgian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolgian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolgian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolgian
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor							
12	Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	50 Pengusaha	50 Pengusaha	100 Pengusaha	100 Pengusaha	100 Pengusaha	100 Pengusaha	450 Pengusaha
13	peningkatan jumlah nilai ekspor	2. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri	1 %	1 %	3 %	3 %	3 %	3 %	13 %
14	jumlah database potensi unggulan yang akurat	3. Pengembangan data base informasi potensi unggulan	- Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							
15	Tersedianya data harga barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dan Barang penting/Strategis, tersedianya data ketersediaan stok barang kepokmas berbasis web	1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	26 Komoditi 10 Kepokmas	26 Komoditi 10 Kepokmas	26 Komoditi 10 Komoditi	26 Komoditi 10 Komoditi	26 Komoditi 10 Komoditi	26 Komoditi 10 Komoditi	26 Komoditi 10 Komoditi

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAP/ ETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Jumlah lokasi sosialisasi produk dalam negeri yg strategis	2. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	- Lokasi	- Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	28 Lokasi
18	Jumlah pendirian toko modern yang berjarak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Cirebon	3. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	- %	- %	5 %	5 %	5 %	10 %	25 %
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan							
19	Tersedianya sarana dan prasarana pasar dan fasilitas umum yang memadai	1. Penataan Sarana dan Prasarana Pasar	9 pemeliharaan Pasar	9 pemeliharaan Pasar	9 Pemeliharaan pasar 2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar 2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar 2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar 2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar 8 Revitalisasi pasar
20	Jumlah SDM pasar tradisional yang terbina	2. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang	1,600 orang
21	Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar tradisional pemda	3. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	20 %

BAB VII

PENUTUP

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon telah berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Strategis yang telah disusun ini demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Cirebon khususnya pada bidang perindustrian dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung salah satu misi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu “Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat”.

Setelah dirumuskan perencanaan stratejik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon bersiap diri untuk menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang. Perencanaan stratejik inilah yang akan dijadikan panduan (*guide line*) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon di masa mendatang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Perencanaan stratejik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen bersama untuk maju dari seluruh jajaran organisasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

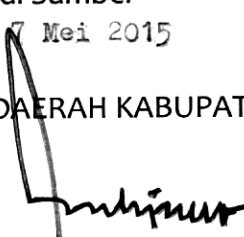
BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 55 , SERI E.50

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIREBON

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD												UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. Meningkatnya pembinaan dan pertumbuhan industri	1. Meningkatnya pertumbuhan industri	Jumlah Peningkatan kualitas produk industri	2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				511.781.369		1.350.000.000		1.450.000.000		1.500.000.000		1.650.000.000		6.461.781.369			
			2.07.17.01	1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Input	Rupiah	414.021.000		414.021.000		800.000.000		900.000.000		950.000.000		1.100.000.000		4.164.021.000		
					Output	Pembinaan Teknik Produksi, Mengajar, Penerapan GKM dan lomba Desain IKM Rotan, kayu, dan bambu	150 IKM	150 IKM		300 IKM		400 IKM		450 IKM		500 IKM		1.800 IKM			
					Outcome	Jumlah peningkatan kualitas produk industri	25 IKM	25 IKM		50 IKM		60 IKM		65 IKM		85 IKM		285 IKM			
			2.07.17.03	2. Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur	Input	Rupiah	97.760.369		97.760.369		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		697.760.369		
					Output	Pembinaan kualitas produksi industri	15 IKM	15 IKM		30 IKM		30 IKM		30 IKM		30 IKM		135 IKM			
					Outcome	Jumlah peningkatan kualitas produk industri	7 IKM	7 IKM		10 IKM		10 IKM		10 IKM		10 IKM		47 IKM			
			2.07.17.04	3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	Input	Rupiah				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.600.000.000			
					Output	Pembinaan HACCP, GMP makanan				100 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		400 IKM			
					Outcome	Jumlah peningkatan kualitas produk industri				20 Produk		20 Produk		20 Produk		20 Produk		80 Produk			
		Jumlah penggunaan teknologi tepat guna	2.07.15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi			369.500.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000		4.619.500.000				
			2.07.15.05	1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Input	Rupiah	369.500.000		369.500.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		500.000.000		2.219.500.000		
					Output	Pembinaan Teknik produksi IKM batik, IKM logam, Mengajar dan workshop industri kreatif, Fasilitas HKI untuk motif batik komunal Kab. Cirebon dan koneksi	220 IKM	220 IKM		250 IKM		250 IKM		250 IKM		250 IKM		1.220 IKM			
					Outcome	Jumlah penggunaan teknologi tepat guna	40 IKM	40 IKM		50 IKM		50 IKM		50 IKM		50 IKM		240 IKM			
			2.07.15.06	2. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Input	Rupiah				600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.400.000.000			
					Output	Fasilitas HKI, Bantuan sarana dan prasarana IKM, Bantuan Peralatan, Pembinaan Teknik, Fasilitas Penerapan Batik Mark, Pembinaan Manajemen Pemasaran IKM LMEIA, Pembinaan Desain dan Lomba Desain Batik industri kreatif				100 IKM		100 IKM		100 IKM		100 IKM		400 IKM			
					Outcome	jumlah penggunaan teknologi tepat guna				25 IKM		25 IKM		25 IKM		25 IKM		100 IKM			

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN PAD' AWAL PERIODE	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah akurasi database perusahaan		4 Pemetaan dan pengembangan database perusahaan	Input : Rupiah	-	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-	600.000.000	-	-
					Output : Updating Data Base Industri, Pemetaan dan Profil komoditi Industri	-	-	-	3 Komoditi	-	3 Komoditi	-	3 Komoditi	-	3 Komoditi	-	12 Komoditi	-	-	-
					Outcome : Jumlah database perusahaan komoditi yang akurat	-	-	-	3 Komoditi	-	3 Komoditi	-	3 Komoditi	-	3 Komoditi	-	12 Komoditi	-	-	-
		Jumlah fasilitas kerja sama antar Pelaku Usaha	2.07.16.05	5 Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	Input : Rupiah	20.080.400	-	20.080.400	-	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-	620.080.400	-	-
					Output : Fasilitas Antara Pihak Perbankan dengan Industri Kecil dan Menengah	30 IKM	30 IKM	-	100 IKM	-	100 IKM	-	100 IKM	-	100 IKM	-	430 IKM	-	-	-
					Outcome : jumlah fasilitas kerja sama antar Pelaku Usaha	3 MOU	3 MOU	-	10 MOU	-	10 MOU	-	10 MOU	-	10 MOU	-	45 MOU	-	-	-
			2.07.16.06	6 Fasilitas kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan pihak swasta	Input : Rupiah	20.080.400	-	20.080.400	-	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-	620.080.400	-	-
					Output : Fasilitas kerjasama antara industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta	30 IKM	30 IKM	-	100 IKM	-	100 IKM	-	100 IKM	-	100 IKM	-	430 IKM	-	-	-
					Outcome : jumlah fasilitas kerja sama antar Pelaku Usaha	3 MOU	3 MOU	-	10 MOU	-	10 MOU	-	10 MOU	-	10 MOU	-	45 MOU	-	-	-
	3. Berfungsinya cluster industri potensial	Jumlah cluster industri potensial	2.07.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		-	-	-	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	12.000.000.000	-	-
			2.07.19.01	1. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	Input : Rupiah	-	-	-	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-	10.000.000.000	-	-
					Output : Penyediaan akses transportasi di sentra industri potensial	-	-	-	-	-	4 Komoditi	-	4 Komoditi	-	4 Komoditi	-	16 Komoditi	-	-	-
					Outcome : jumlah cluster industri potensial	-	-	-	-	-	2 Komoditi	-	2 Komoditi	-	2 Komoditi	-	8 Komoditi	-	-	-
			2.07.19.01	2. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Input : Rupiah	-	-	-	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	2.000.000.000	-	-
					Output : Penyediaan data informasi	-	-	-	-	-	4 Komoditi	-	4 Komoditi	-	4 Komoditi	-	16 Komoditi	-	-	-
					Outcome : jumlah informasi cluster industri potensial	-	-	-	-	-	3 Komoditi	-	3 Komoditi	-	3 Komoditi	-	12 Komoditi	-	-	-
			2.07.18	Program Penataan Struktur Industri		-	-	-	-	106.598.300	-	1.375.000.000	-	1.375.000.000	-	1.375.000.000	-	5.606.598.300	-	-
			2.07.18.02	1. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Input : Rupiah	-	-	-	-	-	-	875.000.000	-	875.000.000	-	875.000.000	-	3.500.000.000	-	-
					Output : Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	-	-	-	-	-	4 Komoditi	-	4 Komoditi	-	4 Komoditi	-	16 Komoditi	-	-	-
					Outcome : jumlah sarana dan prasarana cluster industri potensial	-	-	-	-	-	2 Komoditi	-	2 Komoditi	-	2 Komoditi	-	8 Komoditi	-	-	-
			2.07.18.03	2. Pembinaan keterampilan produksi industri hulu hingga hilir	Input : Rupiah	106.598.300	-	106.598.300	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	2.106.598.300	-	-
					Output : Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Produk dan Kerja sama Afilik Teknologi	15 IKM	15 IKM	-	20 IKM	-	20 IKM	-	20 IKM	-	20 IKM	-	95 IKM	-	-	-
					Outcome : jumlah kerja sama cluster industri potensial	3 MOU	3 MOU	-	5 MOU	-	5 MOU	-	5 MOU	-	5 MOU	-	18 MOU	-	-	-

PENDANAAN INDIKATIF DISPERKINDAG KAB. CIKEBUN TAHUN ANGGARAN 2014-2019

[illegible]

VISI KAB. CIREBON	MISI KAB. CIREBON	VISI DISPERINDAG	MISI DISPERINDAG	TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DICAPAI					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)				
					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN		2014	2015	2016	2017	2018			2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5. Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tenteram	Terwujudnya Industri dan Perdagangan yang Unggul di tingkat nasional	1. Meningkatkan daya saing industri	1. Meningkatkan pembinaan dan pertumbuhan industri	1. Meningkatnya pertumbuhan industri	Jumlah Peningkatan kualitas produk industri	Per tahun	IKM	25	25	50	60	65	85	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	6,461,781,369				
							Per tahun	IKM	7	7	10	10	10	10	1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	4,164,021,000				
							Produk									3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	1,600,000,000			
						Jumlah penggunaan teknologi tepat guna											Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi	4,619,500,000		
					Per tahun	IKM	40	40	50	50	50	50	50	1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	2,219,500,000					
					Per tahun	IKM	-	-	25	25	25	25	25	2. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	2,400,000,000					
					2. Meningkatnya kemampuan SDM industri dan kerja sama antar pemangku kepentingan	Jumlah SDM industri yang terlatih	Per tahun	IKM											Program pembinaan industri	800,000,000
							Per tahun	SDM										1. Pengembangan industri hasil tembakau melalui penerapan good manufacturing practice (GMP)	400,000,000	
							Per tahun	SDM										2. Pengembangan pemasaran industri hasil tembakau	400,000,000	
							Per tahun	SDM											Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	7,162,285,975
Per tahun	SDM												1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	3,332,145,000						
Per tahun	SDM												2. Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri	925,000,000						
Per tahun	SDM												3. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	1,064,980,175						
Jumlah akurasi database perusahaan	Per tahun	Komoditi												4. Pemetaan dan pengembangan database perusahaan	600,000,000					

VISI KAB. CIREBON	MISI KAB. CIREBON	VISI DISPERINDAG	MISI DISPERINDAG	TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DICAPAI					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)																				
					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN		2014	2015	2016	2017	2018			2019																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																				
						Jumlah fasilitasi kerja sama antar Pelaku Usaha	Per tahun	MOU	3	3	10	10	10	10	5. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	620,080,400																				
							Per tahun	MOU	3	3	10	10	10	10	6. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta	620,080,400																				
					3. Berfungsinya cluster industri potensial	Jumlah cluster industri potensial.	Per tahun	Komoditi	-	-	2	2	2	2	2	2	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	12,000,000,000																		
																	Per tahun	Komoditi	-	-	3	3	3	3	3	3	1. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	10,000,000,000								
							2. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	2,000,000,000																												
									Program Penataan Struktur Industri	5,606,598,300																										
											1. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	3,500,000,000																								
							2. Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir	2,106,598,300																												
					2. Meningkatkan daya saing perdagangan	2. Meningkatnya perlindungan konsumen			1. Meningkatkan pemahaman, keamanan dan kenyamanan konsumen dan pelaku usaha	Jumlah masyarakat/konsumen yang mengetahui hak dan kewajiban konsumen	Per tahun	orang	240	240	240	240	240	240	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	6,484,326,200																
							Jumlah Permasalahan yang terfasilitasi	Per tahun											Penyelesaian Aduan	-	-	48	24	24	24	1. Sosialisasi Perlindungan Konsumen	1,418,096,000									
																										Jumlah jenis produk dan jasa yang aman dikonsumsi sesuai dengan standard	Per tahun	Jenis	500	500	500	500	500	500	2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	250,000,000
																																			3. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	598,392,050

VISI KAB. CIREBON	MISI KAB. CIREBON	VISI DISPERINDAG	MISI DISPERINDAG	TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DICAPAI					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)										
					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN																		
										2014	2015	2016	2017	2018			2019									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
				4. Meningkatnya penyelenggaraan pasar	3. Meningkatkan penataan pasar tradisional pemda dan penataan pedagang kaki lima	Tersedianya sarana dan prasarana pasar dan fasilitas umum yang memadai	Per tahun	Pasar	9 Pemeliharaan pasar	9 Pemeliharaan pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	77,745,339,999										
																								1. Penataan Sarana dan Prasarana Pasar	71,963,958,550	
															Jumlah SDM pasar tradisional yang terbina	Per tahun	orang	320	320	320	320	320	320	2. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar		3,980,131,196
															Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar tradisional pemda	Per tahun	%	4	4	4	4	4	4	3. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah		1,801,250,253

TABEL 6.1.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah Peningkatan kualitas produk industri	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri							
		1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	25 IKM	25 IKM	50 IKM	60 IKM	65 IKM	85 IKM	285 IKM
		2. Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur	7 IKM	7 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	47 IKM
		3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	- Produk	- Produk	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	80 Produk
2.	Jumlah penggunaan teknologi tepat guna	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi							
		1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	40 IKM	40 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	240 IKM
		2. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	- IKM	- IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	25 IKM	100 IKM
		Program pembinaan industri							
3.	Jumlah SDM industri yang terlatih	1. Pengembangan industri hasil tembakau melalui penerapan good manufacturing practice (GMP)	- IKM	- IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	40 IKM
		2. Pengembangan pemasaran industri hasil tembakau	- SDM	- SDM	10 SDM	10 SDM	10 SDM	10 SDM	40 SDM
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							-
		1. Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	20 IKM	20 IKM	23 IKM	23 IKM	23 IKM	23 IKM	112 SDM
		2. Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri	- SDM	- SDM	5 SDM	8 SDM	8 SDM	8 SDM	29 SDM
		3. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	10 IKM	10 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM	30 IKM	130 SDM

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAP SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Jumlah jenis produk dan jasa yang aman dikonsumsi sesuai dengan standard	3. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	500 Jenis	500 Jenis	500 Jenis	500 Jenis	500 Jenis	500 Jenis	2,500 Jenis
10	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya sesuai standar	4. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolagian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolagian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolagian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolagian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolagian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolagian	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolagian
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor							
12	Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	50 Pengusaha	50 Pengusaha	100 Pengusaha	100 Pengusaha	100 Pengusaha	100 Pengusaha	450 Pengusaha
13	peningkatan jumlah nilai ekspor	2. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri	1 %	1 %	3 %	3 %	3 %	3 %	13 %
14	jumlah database potensi unggulan yang akurat	3. Pengembangan data base informasi potensi unggulan	- Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri							
15	Tersedianya data harga barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dan Barang penting/Strategis, tersedianya data ketersediaan stok barang kepokmas berbasis web	1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	26 Komoditi 10 Kepokmas	26 Komoditi 10 Kepokmas	26 Komoditi 10 Komoditi	26 Komoditi 10 Komoditi	26 Komoditi 10 Komoditi	26 Komoditi 10 Komoditi	26 Komoditi- ti 10 Komoditi

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Jumlah lokasi sosialisasi produk dalam negeri yg strategis	2. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	- Lokasi	- Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	7 Lokasi	28 Lokasi
18	Jumlah pendirian toko modern yang berjarak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Cirebon	3. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	- %	- %	5 %	5 %	5 %	10 %	25 %
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan							
19	Tersedianya sarana dan prasarana pasar dan fasilitas umum yang memadai	1. Penataan Sarana dan Prasarana Pasar	9 pemeliharaan Pasar	9 pemeliharaan Pasar	9 Pemeliharaan pasar 2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar 2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar 2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar 2 Revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar 8 Revitalisasi pasar
20	Jumlah SDM pasar tradisional yang terbina	2. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang	1,600 orang
21	Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar tradisional pemda	3. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	20 %

TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DICAPAI					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN										
						2014	2015	2016	2017	2018			2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Meningkat nya pembinaan dan pertumbuhan industri	1. Meningkat nya pertumbuhan industri	Jumlah Peningkatan kualitas produk industri	Per tahun	IKM	25	25	50	60	65	85	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	6,461,781,369		
											1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	4,164,021,000		
											2. Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur	697,760,369		
				Produk	-	-	20	20	20	20	3. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	1,600,000,000		
		Jumlah penggunaan teknologi tepat guna										Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi	4,619,500,000	
			Per tahun	IKM	40	40	50	50	50	50	50	1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	2,219,500,000	
			Per tahun	IKM	-	-	25	25	25	25	25	2. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	2,400,000,000	
		2. Meningkat nya kemampuan SDM industri dan kerja sama antar pemangku kepentingan	Jumlah SDM industri yang terlatih			-							Program pembinaan industri	800,000,000
				Per tahun	IKM	-	-	10	10	10	10	10	1. Pengembangan industri hasil tembakau melalui penerapan good manufacturing practice (GMP)	400,000,000
	Per tahun			SDM	-	-	10	10	10	10	10	2. Pengembangan pemasaran industri hasil tembakau	400,000,000	
												Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	7,162,285,975	
	Per tahun			SDM	20	20	23	23	23	23	23	1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	3,332,145,000	
	Per tahun			SDM	-	-	5	8	8	8	8	2. Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri	925,000,000	
	Per tahun	SDM		10	10	30	30	30	30	30	3. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	1,064,980,175		
	Jumlah akurasi database perusahaan	Per tahun	Komoditi	-	-	3	3	3	3	3	4. Pemetaan dan pengembangan database perusahaan	600,000,000		

TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DITAIKANI					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN		2014	2015	2016	2017	2018			2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Jumlah fasilitasi kerja sama antar Pelaku Usaha	Per tahun	MOU	3	3	10	10	10	10	5. Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	620,080,400	
			Per tahun	MOU	3	3	10	10	10	10	6. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta	620,080,400	
	3. Berfungsi nya cluster industri potensial	Jumlah cluster industri potensial	Per tahun	Komoditi	-	-	2	2	2	2	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	12,000,000,000	
				Komoditi	-	-	3	3	3	3	1. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	10,000,000,000	
			Pertahun	Komoditi	-	-	2	2	2	2	2. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	2,000,000,000	
											Program Penataan Struktur Industri	5,606,598,300	
				MOU	3	3	5	5	5	5	1. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	3,500,000,000	
											2. Pembinaan keterkaitan industri hulu hingga hilir	2,106,598,300	
2. Meningkat nya perlindungan konsumen	1. Meningkatkan pemahaman, keamanan dan	Jumlah masyarakat/konsumen yang mengetahui hak dan kewajiban konsumen	Per tahun	orang	240	240	240	240	240	240	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	6,484,326,200	
											1. Sosialisasi Perlindungan Konsumen	1,418,096,000	
		Jumlah Permasalahan yang terfasilitasi	Per tahun	Penyelesaian Aduan	-	-	48	24	24	24	2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	250,000,000	
		Jumlah jenis produk dan jasa yang aman dikonsumsi sesuai dengan standard	Per tahun	Jenis	500	500	500	500	500	500	3. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	598,392,050	

TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DIC					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN		2014	2015	2016	2017	2018			2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya sesuai standar	Per tahun	tertib ukur	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolologi an	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolologia n	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolologi an	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolologi an	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolologi an	10 Pos ukur ulang, 25 SPBU, 14 SPBE, 7 uji BDKT, dan 10 Sosialisasi Perda Tera, belanja alat kemetrolologi an	4. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah	4,217,838,150	
3. Meningkatkan nya pertumbuhan perdagangan	1. Meningkatkan nya fasilitas pelayanan ekspor dan promosi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	Per tahun	Pengusaha	50	50	100	100	100	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	8,543,653,800	
		peningkatan jumlah nilai ekspor	Per tahun	%	1	1	3	3	3	3	1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	629,604,800	
		jumlah database potensi unggulan yang akurat	Per tahun	Dokumen	-	-	1	-	1	-	2. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri	7,414,049,000	
											4. Pengembangan data base informasi potensi unggulan	500,000,000	
	2. Meningkatkan nya informasi pemantauan barang kepokmas dan strategis serta perlindungan pasar tradisional	Tersedianya data harga barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dan Barang penting/Strategis, tersedianya data ketersediaan stok barang kepokmas berbasis web	Per tahun	Komoditi & Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	26 komoditi, 10 Kepokmas	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4,759,880,500	
		Jumlah lokasi sosialisasi produk dalam negeri yg strategis	Per tahun	Lokasi	-	-	7	7	7	7	1. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	2,509,880,500	
		Jumlah pendirian toko modern yang berjarak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Cirebon	Per tahun	%	-	-	5	5	5	10	3. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	2,000,000,000	
											4. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	250,000,000	

TUJUAN MISI	SASARAN MISI				KONDISI TAHUN KE (0)	TARGET YANG INGIN DI					PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN								
						2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Meningkatnya penyelenggaraan pasar	1. Meningkatkan penataan pasar tradisional pemda										Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	77,745,339,999
		Tersedianya sarana dan prasarana pasar dan fasilitas umum yang memadai	Per tahun	Pasar	9 Pemeliharaan pasar	9 Pemeliharaan pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	9 Pemeliharaan pasar dan 2 revitalisasi pasar	1. Penataan Sarana dan Prasarana Pasar	71,963,958,550
		Jumlah SDM pasar tradisional yang terbina	Per tahun	orang	320	320	320	320	320	320	2. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pasar	3,980,131,196
		Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar tradisional pemda	Per tahun	%	4	4	4	4	4	4	3. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1,801,250,253